

KEWENANGAN PENERIMA FIDUSIA DALAM MELAKUKAN PENARIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Ahmad Fajri Kahar

Jurusan/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konflik norma pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam memperoleh pembayaran kembali piutangnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait hak Penerima Fidusia untuk melakukan penarikan/pengambilan obyek fidusia menimbulkan konflik norma dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) R.Bg. Karena ketentuan Pasal 30 tersebut ditafsirkan “seolah-olah” Penerima Fidusia memiliki hak untuk memaksa Pemberi Fidusia untuk menyerahkan obyek fidusia. Sehingga di dalam praktik di masyarakat, banyak kreditur menafsirkannya dengan melakukan sendiri penarikan/pengambilan secara paksa bahkan disertai kekerasan. Sedangkan menurut hukum acara perdata, penegakan hukum hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Banyaknya kejadian yang dialami masyarakat terkait kesalahan menafsirkan tersebut, selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil kepada MK, yang kemudian diputus pada intinya pemberi fidusia harus secara sukarela bersedia menyerahkan obyek fidusia. *Kedua*, Evaluasi ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dalam jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Putusan MK justru mengembalikan perlindungan hukum dan rasa keadilan yang seimbang antara kreditur dan debitur, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya antara lain hukum acara perdata. Akan tetapi bagi penerima fidusia, evaluasi tersebut tentunya cukup sulit untuk dilaksanakan. Sehingga untuk masa mendatang akan menyebabkan pemilik modal atau pelaku usaha di bidang perbankan atau lembaga keuangan lainnya tidak tertarik memberikan pinjaman kepada masyarakat, apabila pinjaman tersebut hanya dijamin dengan jaminan fidusia, terkait sulitnya melakukan eksekusi.

Kata kunci: jaminan fidusia, parate eksekusi, penarikan paksa

KEWENANGAN PENERIMA FIDUSIA DALAM MELAKUKAN PENARIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Ahmad Fajri Kahar

Jurusan/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the conflict of norms in the provisions of Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and legal protection for fiduciary recipients in obtaining repayment of their receivables after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This research is a normative juridical research, using a statutory and conceptual approach. Based on the discussion, conclusions are obtained: First, the provisions of Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees related to the right of Fiduciary Recipients to withdraw/take fiduciary objects create a conflict of norms with the provisions in civil procedural law, namely Article 200 paragraph (11) HIR/ Article 218 paragraph (2) R.Bg. Because the provisions of Article 30 are interpreted as "as if" the Fiduciary Recipient has the right to force the Fiduciary Giver to surrender the fiduciary object. So that in practice in the community, many creditors interpret it by making their own withdrawals/takings by force, even with violence. Meanwhile, according to civil procedural law, law enforcement of these rights can only be done through the courts. The number of incidents experienced by the community related to the misinterpretation, then the provisions in Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees were subjected to a material review to the Constitutional Court, which was then decided in essence that the fiduciary giver must voluntarily be willing to surrender the fiduciary object. Second, the evaluation of the provisions regarding the execution of fiduciary guarantees by the Constitutional Court does not result in the loss of legal protection for fiduciary recipients in obtaining repayment of their receivables. The Constitutional Court's decision actually restores legal protection and a balanced sense of justice between creditors and debtors, taking into account the previously applicable legal provisions, including civil procedural law. However, for fiduciary recipients, this evaluation is certainly quite difficult to carry out. So that in the future it will cause capital owners or business actors in the banking sector or other financial institutions not to be interested in providing loans to the public, if the loans are only guaranteed by fiduciary guarantees, related to the difficulty of carrying out executions.

Keywords: fiduciary guarantee, parate execution, forced confiscation